

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2018



Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2018

ISSN : 0126-4698

No. Publikasi: 18540.1911

Katalog: 7203007.18

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 83 halaman

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung

Penyunting:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung

Desain Kover oleh:

Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung

Penerbit:

©BPS Provinsi Lampung

Pencetak:

CV. Jaya Wijaya

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2018, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2017 dan tahun 2018 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.


Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang sangat kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, November 2019

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Yeane Irmaningrum S.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
BAB III. ULASAN RINGKAS	13
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung	13
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung	17
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung	18
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	20
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	22
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	23
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung	23
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2017 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 (Juta Rupiah)	15
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2018 (Juta Rupiah).....	16
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2017-2018	20
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2017-2018 (Ribu Rupiah).....	21
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2017-2018	23
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018	27
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018.....	28
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018	29
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018.....	30
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018	31
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2018.....	32
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018	33
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2018	34
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018	35
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018.....	36

Tabel 11.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018	37
Tabel 12.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018.....	38
Tabel 13.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018.....	39
Tabel 14.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018.....	40
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017- 2018.....	41
Tabel 16.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018	42
Tabel 17.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018	43
Tabel 18.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2017-2018	44
Tabel 19.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2017- 2018.....	45
Tabel 20.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018.....	46
Tabel 21.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018	47
Tabel 22.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2018.....	48
Tabel 23.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018.....	49
Tabel 24.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2018.....	50
Tabel 25.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018.....	51
Tabel 26.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018.....	52
Tabel 27.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018	53
Tabel 28.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018.....	54
Tabel 29.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018	55
Tabel 30.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018.....	56

Tabel 31.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2018.....	57
Tabel 32.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018.....	58
Tabel 33.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018.....	59
Tabel 34.	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2017-2018.....	60
Tabel 35.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2017-2018.....	61
Tabel 36.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018.....	62
Tabel 37.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018.....	63
Tabel 38.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2017-2018	64
Tabel 39.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018	65
Tabel 40.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2017-2018	66
Tabel 41.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018	67
Tabel 42.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018.....	68
Tabel 43.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018	69
Tabel 44.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018	70
Tabel 45.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018.....	71
Tabel 46.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018	72
Tabel 47.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2018.....	73
Tabel 48.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018	74
Tabel 49.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018	75
Tabel 50.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2017-2018	76

Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2017-2018 77

<https://lampung.bps.go.id>



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2018	17
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2018.....	19
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018	22

<https://lampung.bps.go.id>

BAB I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bagi Hasil Pajak:
Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- Bagi Hasil Bukan Pajak :

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- DAU

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- DAK

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- Lain-lain pendapatan yang sah, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

BAB III. ULASAN RINGKAS

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Sejak tahun 2002, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera, dengan

prioritas pada pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi upaya prioritas untuk percepatan pertumbuhan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWACITA (9 program pembangunan nasional), sehingga pembangunan berjalan sinergi dan penuh koordinasi. Dikutip dari Publikasi PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2014 – 2018, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen *year on year* (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 5,16 persen (yoy).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 8,15 trilyun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu 7,02 trilyun rupiah atau naik 16,09 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin

tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik. (Tabel 3.1).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2018 dianggarkan mencapai 4,29 trilyun rupiah mengalami kenaikan 62,37 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,64 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. (Tabel 3.1).

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 4,85 trilyun rupiah mengalami kenaikan 15,12 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar 4,21 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2018 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 3,26 trilyun rupiah naik 15,80 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,82 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2017 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2018 (Juta Rupiah)

Rincian	Realisasi 2017	Anggaran 2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	7 018 067,52	8 147 550,21	16,09
Pendapatan Daerah	6 813 755,01	7 507 550,21	10,18
Pendapatan Asli Daerah	2 750 596,48	3 179 595,89	15,60
Dana Perimbangan	2 643 744,66	4 292 543,09	62,37
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 419 413,87	35 411,24	(97,51)
Penerimaan Pembiayaan	204 312,51	640 000,00	213,25
PENGELUARAN DAERAH	7 045 414,97	8 147 850,21	15,65
Belanja Tidak Langsung	4 211 701,80	4 848 524,29	15,12
Belanja Langsung	2 818 713,16	3 264 165,92	15,80
Pengeluaran Pembiayaan	15 000,00	35 160,00	134,40

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2018. Dari rencana penerimaan sebesar 8,15 triliun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 7,63 triliun rupiah atau mengalami penurunan 6,32 persen. Penurunan ini dapat menjadi evaluasi pemerintah daerah dalam melakukan penyerapan anggaran di tahun berikutnya. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah tidak jauh berbeda dengan penerimaan. Realisasi anggaran lebih rendah dari yang dianggarkan tahun 2018. Hal tersebut terlihat pada perubahan seluruh komponen pendukungnya seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pembiayaan yang mengalami penurunan. Realisasi belanja langsung turun 2,17 persen menjadi 3,19 triliun rupiah dari 3,26 triliun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 10,37 persen dari rencana anggaran 4,85 triliun rupiah menjadi 4,34 triliun rupiah. (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2018 (Juta Rupiah)

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	8 147 550,21	7 633 025,85	(6,32)
Pendapatan Daerah	7 507 550,21	7 098 983,64	(5,44)
Pendapatan Asli Daerah	3 179 595,89	2 864 235,75	(9,92)
Dana Perimbangan	4 292 543,09	2 816 327,38	(34,39)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	35 411,24	1 418 420,51	3905,57
Penerimaan Pembiayaan	640 000,00	534 042,21	(16,56)
PENGELUARAN DAERAH	8 147 850,21	7 539 148,97	(7,47)
Belanja Tidak Langsung	4 848 524,29	4 345 688,27	(10,37)
Belanja Langsung	3 264 165,92	3 193 300,70	(2,17)
Pengeluaran Pembiayaan	35 160,00	160,00	(99,54)

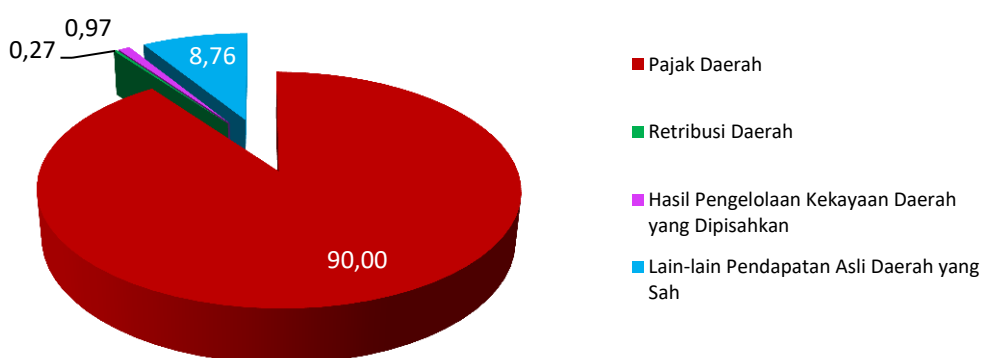
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 2,75 trilyun menjadi 2,86 trilyun rupiah. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2018 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan sebesar 40,35 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2018



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

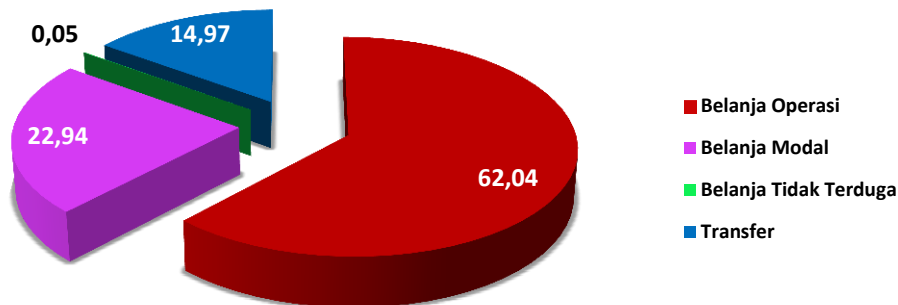
Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2018 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 90,00 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,27 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2018, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 62,04 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa dan belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 76,81 persen dan 123,35 persen. (Gambar 3.2 dan diolah dari Tabel 2).

Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2018



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018 sebesar 62,04 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Gambar 3.2).

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 22,94 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Gambar 3.2).

Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2017 belanja tidak langsung tahun 2018 mengalami penurunan. Jika tahun 2017 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 59,91 persen, maka tahun 2018 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 57,64 persen. Dengan turunnya *share* belanja tidak langsung tahun 2018, hal ini berarti pemerintah masih cenderung meningkatkan alokasi dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi. (Tabel 3.3)

Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2017-2018

Jenis Belanja	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	59,91	57,64
Belanja Pegawai	24,42	22,03
Belanja Hibah	18,33	19,45
Belanja Bantuan Sosial	0,06	0,01
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15,64	14,97
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,16	1,09
Belanja Tidak Terduga	0,30	0,05
Belanja Langsung	40,09	42,36
Belanja Pegawai	0,00	2,04
Belanja Barang dan Jasa	19,45	17,37
Belanja Modal	20,65	22,94

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah otonomi baru/pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018, penerimaan daerah Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2017, penerimaan daerah tahun 2018 naik 2,98 persen dari 22,11 trilyun rupiah menjadi 22,77 trilyun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 14,25 persen dari 4,03 trilyun rupiah menjadi 4,01 trilyun rupiah di tahun 2018. (Tabel 3.4).

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2018 justru mengalami penurunan 5,52 persen atau turun menjadi 21,52 trilyun rupiah dari 22,77

trilyun rupiah di tahun 2017. Apabila dilihat dari strukturnya, belanja tidak langsung mengalami penurunan hingga mencapai 14,44 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2018 juga naik 5,44 persen. (Tabel 3.4).

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2018 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 77,45 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara sebesar 88,02 persen, diikuti Kabupaten Lampung Timur sebesar 85,50 persen, dan Kabupaten Tanggamus sebesar 85,44 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 56,10 persen. (Diolah dari Tabel 35).

Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2017-2018 (Ribu Rupiah)

Rincian	2017	2018	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	22 115 268 694,89	22 774 936 527,16	2,98
Pendapatan Daerah	21 224 707 065,40	21 763 769 643,82	2,54
Pendapatan Asli Daerah	1 946 514 939,90	1 755 317 338,90	(9,82)
Dana Perimbangan	15 232 247 423,16	15 401 585 464,78	1,11
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4 032 298 720,05	4 606 866 840,14	14,25
Penerimaan Pembiayaan	890 561 629,50	1 011 166 883,33	13,54
PENGELUARAN DAERAH	22 773 536 885,72	21 516 002 125,31	(5,52)
Belanja Tidak Langsung	12 965 997 146,67	11 094 229 670,55	(14,44)
Belanja Langsung	9 699 427 529,07	10 227 287 554,75	5,44
Pengeluaran Pembiayaan	108 112 209,98	194 484 900,01	79,89

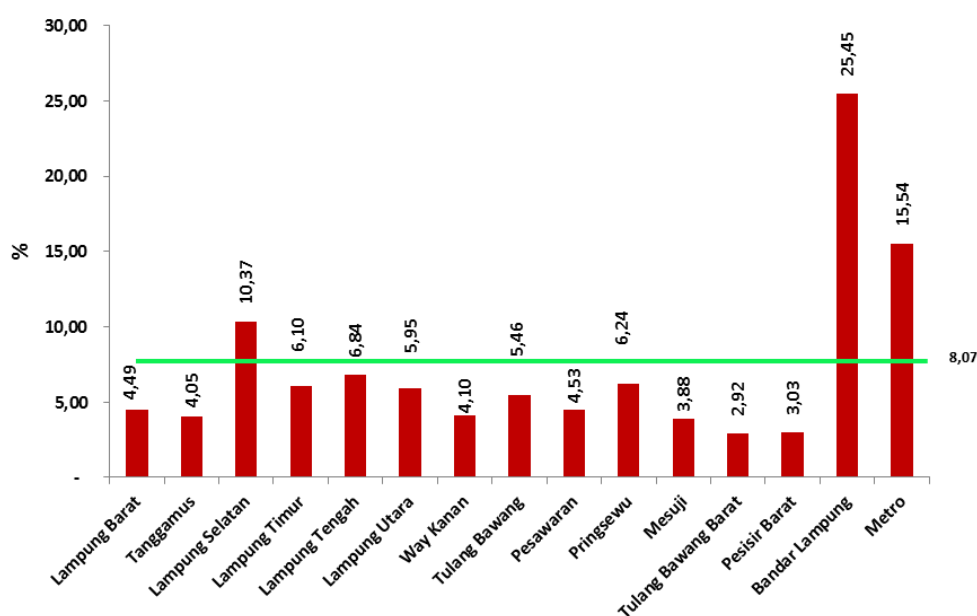
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan pada pos PAD turun 9,82 persen dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 1,95 triliun rupiah menjadi 1,75 triliun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 8,06 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Diolah dari Tabel 19).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 25,45 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki rasio kemandirian paling rendah yaitu 2,92 persen. (Gambar 3.3).

Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2018



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2018 meningkatkan kontribusi belanja langsung dari 42,79 persen tahun 2017 menjadi 47,97 persen. Sementara itu, untuk belanja tidak langsung, pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 57,21 persen tahun 2017 menjadi 52,03 persen tahun 2018. Dari Tabel 3.5, pemerintah kabupaten/kota mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja menjadi 36,92 persen dari 38,24 persen tahun 2017. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota mulai mengurangi alokasi dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara.

Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2017-2018

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100	100
Belanja Tidak Langsung	57,21	52,03
Belanja Pegawai	38,24	36,92
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	1,43	1,90
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,73	1,11
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13,49	11,52
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Langsung	42,79	47,97
Belanja Pegawai	1,41	5,11
Belanja Barang dan Jasa	18,90	21,68
Belanja Modal	22,49	21,01

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

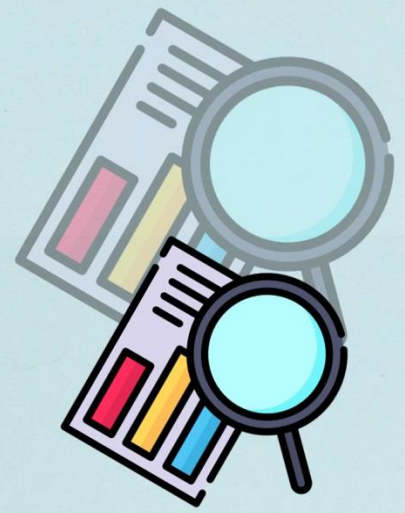
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya

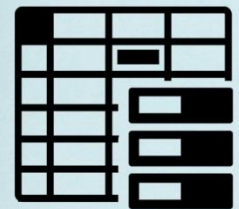
kebelanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

<https://lampung.bps.go.id>



LAMPIRAN TABEL



Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	6 813 755 009,49	7 098 983 642,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 750 596 478,33	2 864 235 753,08
Pajak Daerah	2 451 408 220,07	2 577 739 717,94
Retribusi Daerah	7 322 619,00	7 844 961,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 522 159,55	27 771 046,31
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	264 343 479,70	250 880 026,93
DANA PERIMBANGAN	2 643 744 659,46	2 816 327 377,99
Bagi Hasil Pajak	249 340 043,38	122 496 301,79
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	93 544 761,46
Dana Alokasi Umum (DAU)	144 778 671,12	1 854 701 094,16
Dana Alokasi Khusus (DAK)	104 561 372,26	745 585 220,58
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 851 595 354,00	1 418 420 511,53
Pendapatan Hibah	542 809 262,08	11 870 119,34
Dana Darurat	1 419 413 871,70	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	10 374 402,20	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16 765 434,40	15 719 965,29
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 384 774 035,10	1 390 830 426,90

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	5 476 921 595,65	7 538 988 966,12
Belanja Tidak Langsung	3 337 212 484,34	4 345 688 270,39
Belanja Pegawai	743 620 265,32	1 660 859 828,14
Belanja Bunga	0,00	1 784 056,32
Belanja Subsidi	0,00	1 852 030,96
Belanja Hibah	1 450 803 387,99	1 466 423 924,70
Belanja Bantuan Sosial	2 587 280,00	529 560,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 089 846 007,46	1 128 477 614,77
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	46 368 543,58	81 983 574,20
Belanja Tidak Terduga	3 987 000,00	3 777 681,30
Belanja Langsung	2 139 709 111,31	3 193 300 695,73
Belanja Pegawai	95 685 683,12	154 147 095,72
Belanja Barang dan Jasa	1 038 243 623,01	1 309 826 167,17
Belanja Modal	1 005 779 805,18	1 729 327 432,84

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	189 312 510,50	533 882 206,31
Penerimaan Pembiayaan Daerah	204 312 510,50	534 042 206,31
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	204 312 510,50	54 158 268,81
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	479 883 937,50
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15 000 000,00	160 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15 000 000,00	160 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
		0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berke- naan	(27 347 445,24)	93 783 100

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 069 095 669,90	1 124 189 349,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH	82 125 266,37	50 471 541,00
Pajak Daerah	10 144 981,62	11 617 377,00
Retribusi Daerah	1 887 059,29	2 014 963,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 213 618,61	3 409 191,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66 879 606,85	33 430 010,00
DANA PERIMBANGAN	773 064 817,36	854 830 511,90
Bagi Hasil Pajak	12 200 142,37	12 769 138,86
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 380 656,97	12 922 139,04
Dana Alokasi Umum (DAU)	519 160 196,00	521 743 958,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	224 323 822,02	307 395 276,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	213 905 586,18	218 887 297,00
Pendapatan Hibah	54 009 539,00	48 916 520,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	56 267 227,18	57 487 256,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	103 628 820,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	112 483 521,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 565 897 169,14	1 539 170 374,30
PENDAPATAN ASLI DAERAH	56 177 617,87	62 350 681,08
Pajak Daerah	16 846 967,78	17 664 599,87
Retribusi Daerah	1 163 556,12	1 180 916,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 718 487,86	3 883 833,52
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34 448 606,12	39 621 331,54
DANA PERIMBANGAN	1 130 001 624,79	1 073 484 123,68
Bagi Hasil Pajak	27 788 689,33	30 166 651,41
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	30 893 964,57	22 729 667,10
Dana Alokasi Umum (DAU)	775 574 559,00	778 605 786,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	295 744 411,89	241 982 019,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	379 717 926,48	403 335 569,54
Pendapatan Hibah	0,00	61 417 480,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	71 622 322,02	66 034 928,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	308 095 604,47	275 883 161,55

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 075 494 140,05	2 077 357 073,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	206 061 231,20	215 475 629,19
Pajak Daerah	78 131 730,07	91 955 613,77
Retribusi Daerah	5 700 320,79	9 159 993,88
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 173 848,53	6 783 912,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	116 055 331,81	107 576 109,45
DANA PERIMBANGAN	1 286 922 564,04	1 407 454 514,65
Bagi Hasil Pajak	37 257 441,07	26 675 426,58
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 199 205,44
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 012 255 482,00	1 019 207 779,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	237 409 640,97	348 372 103,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	582 510 344,81	454 426 929,30
Pendapatan Hibah	99 359 488,60	99 837 587,01
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	98 774 749,63	93 389 454,90
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	384 376 106,59	35 000 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1 000 000,00
Dana Desa	0,00	225 199 887,40
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 017 146 758,94	2 051 436 100,61
PENDAPATAN ASLI DAERAH	207 235 268,58	125 035 423,32
Pajak Daerah	39 718 721,29	53 213 791,41
Retribusi Daerah	5 058 720,70	5 715 507,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 282 977,08	2 739 592,25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160 174 849,51	63 366 532,44
DANA PERIMBANGAN	1 489 412 947,93	1 494 906 155,71
Bagi Hasil Pajak	82 280 387,54	24 368 533,38
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	45 372 438,25
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 062 555 526,00	1 069 168 109,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	344 577 034,39	355 997 075,08
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	320 498 542,44	431 494 521,59
Pendapatan Hibah	274 429,50	95 549 880,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	102 581 764,94	335 944 641,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217 642 348,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 349 373 634,77	2 622 912 022,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147 048 201,16	179 370 202,74
Pajak Daerah	63 604 185,08	72 206 626,41
Retribusi Daerah	4 845 199,29	7 085 160,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 425 023,30	6 479 910,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73 173 793,49	93 598 505,35
DANA PERIMBANGAN	1 722 465 741,92	1 847 859 041,00
Bagi Hasil Pajak	56 056 783,41	43 964 411,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	3 713 797,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 317 680 979,00	1 378 175 214,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	348 727 979,51	422 005 619,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	479 859 691,68	595 682 779,13
Pendapatan Hibah	886 018,88	154 411 949,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	109 070 447,81	132 171 085,13
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	241 434 963,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	128 468 262,00	309 099 745,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 703 964 808,23	1 726 771 079,13
PENDAPATAN ASLI DAERAH	103 970 703,71	102 289 605,03
Pajak Daerah	22 572 848,96	24 074 684,98
Retribusi Daerah	1 922 881,42	1 904 993,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 372 873,37	8 977 378,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72 102 099,96	67 332 548,29
DANA PERIMBANGAN	1 246 229 672,49	1 206 059 795,86
Bagi Hasil Pajak	37 548 261,41	16 353 712,24
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 671 168,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	945 025 570,00	949 531 402,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	263 655 841,08	226 503 513,12
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	353 764 432,02	410 844 700,86
Pendapatan Hibah	71 251 400,00	70 557 920,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	84 991 975,59	332 709 803,48
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	195 028 192,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 492 864,44	7 576 977,38

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 340 655 509,81	1 385 711 569,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	49 551 283,41	56 764 977,00
Pajak Daerah	15 182 720,24	18 384 783,00
Retribusi Daerah	886 384,80	1 383 814,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 117 487,41	3 924 887,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30 364 690,95	33 071 493,00
DANA PERIMBANGAN	1 034 484 642,82	1 023 173 716,00
Bagi Hasil Pajak	36 780 923,13	16 489 467,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 724 219,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	650 838 237,00	655 518 878,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	346 865 482,69	337 441 152,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	256 619 583,59	305 772 876,00
Pendapatan Hibah	9 000 000,00	53 295 943,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	65 358 337,59	252 456 234,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182 260 346,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	900,00	20 699,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 160 317 938,79	1 228 883 918,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 931 506,76	67 129 956,00
Pajak Daerah	20 788 976,11	19 836 334,00
Retribusi Daerah	1 628 987,03	1 530 350,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 047 289,32	3 078 120,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 466 254,31	42 685 152,00
DANA PERIMBANGAN	825 407 650,78	903 489 250,00
Bagi Hasil Pajak	21 789 653,17	18 466 366,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 469 873,03	15 435 304,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	599 655 961,00	612 112 587,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	189 492 163,58	257 474 993,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	293 978 781,25	258 264 712,00
Pendapatan Hibah	0,00	44 718 589,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	121 733 355,28	213 546 123,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 000 000,00	0,00
Dana Desa	0,00	127 242 125,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	168 245 425,97	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 328 402 245,76	1 285 923 925,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50 150 346,62	58 265 161,93
Pajak Daerah	21 036 338,21	24 664 796,09
Retribusi Daerah	4 212 285,55	5 232 815,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318 037,55	410 196,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24 583 685,32	27 957 354,47
DANA PERIMBANGAN	930 162 730,63	844 615 366,87
Bagi Hasil Pajak	28 115 458,96	12 595 358,06
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 389 806,65
Dana Alokasi Umum (DAU)	668 378 478,00	669 276 831,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	233 668 793,67	149 353 371,16
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	348 089 168,50	383 043 396,28
Pendapatan Hibah	63 576 390,00	48 058 854,37
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	61 132 280,05	233 139 684,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	223 380 498,45	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	101 844 857,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 194 493 674,54	1 150 545 601,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	73 405 027,12	71 824 582,14
Pajak Daerah	17 935 953,76	21 289 348,70
Retribusi Daerah	2 845 430,51	3 327 703,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	836 477,51	1 660 233,85
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	51 787 165,35	45 547 296,18
DANA PERIMBANGAN	860 970 139,91	842 346 040,38
Bagi Hasil Pajak	27 852 208,00	9 953 425,65
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	13 470 569,13
Dana Alokasi Umum (DAU)	621 967 450,00	621 967 450,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	211 150 481,00	196 954 595,59
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260 118 507,51	236 374 979,34
Pendapatan Hibah	687 547,45	43 819 268,75
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	62 288 021,42	61 031 350,59
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53 167 797,00	26 250 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	105 274 360,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	143 975 141,64	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	729 684 071,89	966 621 241,77
PENDAPATAN ASLI DAERAH	22 114 016,97	32 767 743,90
Pajak Daerah	7 373 015,84	9 101 628,93
Retribusi Daerah	1 366 932,44	2 813 349,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 056 603,17	1 067 293,19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12 317 465,52	19 785 472,13
DANA PERIMBANGAN	577 752 823,93	615 640 647,75
Bagi Hasil Pajak	17 608 516,75	16 787 209,61
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 168 527,59	13 436 651,52
Dana Alokasi Umum (DAU)	444 344 769,00	446 272 067,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	98 631 010,59	139 144 719,62
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	148 772 525,62	195 545 790,12
Pendapatan Hibah	9 500 000,00	24 402 320,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 171 044,31	48 476 410,12
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	87 417 060,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91 101 481,31	35 250 000,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2017-2018**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	902 466 887,83	946 197 873,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	97 387 117,99	27 613 469,64
Pajak Daerah	10 351 676,92	14 020 637,89
Retribusi Daerah	1 970 729,20	2 906 222,11
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 558 804,22	1 632 351,65
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83 505 907,65	9 054 257,98
DANA PERIMBANGAN	670 846 172,72	725 406 877,46
Bagi Hasil Pajak	22 467 717,31	11 797 096,29
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 124 870,96	12 876 195,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	459 231 176,00	463 478 442,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	175 022 408,44	237 255 143,34
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	134 233 597,11	193 177 526,53
Pendapatan Hibah	0,00	34 002 020,30
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	44 138 406,35	79 775 225,31
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	74 708 156,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	90 095 190,76	4 692 124,92

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	813 113 164,46	775 333 888,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	42 895 150,22	23 481 041,77
Pajak Daerah	5 101 054,61	6 415 256,31
Retribusi Daerah	2 499 888,78	2 880 782,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35 294 206,82	14 185 003,15
DANA PERIMBANGAN	596 175 229,65	573 283 931,03
Bagi Hasil Pajak	12 066 179,34	9 284 715,46
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 138 665,04	12 866 687,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	410 991 252,00	417 316 170,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	191 580 410,20	133 816 358,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141 441 507,66	178 568 915,34
Pendapatan Hibah	0,00	21 440 640,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 798 737,21	47 783 898,57
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10 000 000,00
Dana Desa	0,00	98 950 576,10
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	92 642 770,46	393 800,68

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 081 420 040,06	2 162 096 665,25
PENDAPATAN ASLI DAERAH	612 809 681,25	550 275 048,13
Pajak Daerah	373 764 303,00	398 448 008,99
Retribusi Daerah	28 256 993,00	29 579 486,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13 062 932,00	14 894 667,17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197 725 453,25	107 352 885,90
DANA PERIMBANGAN	1 408 084 148,00	1 364 968 467,08
Bagi Hasil Pajak	52 149 891,00	52 323 993,75
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 367 285,00	13 004 745,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 034 730 849,00	1 034 730 849,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	306 836 123,00	264 908 878,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60 526 210,81	246 853 150,04
Pendapatan Hibah	4 500 000,00	90 008 850,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 526 210,81	156 844 300,04
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7 500 000,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	893 181 351,22	850 862 998,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	154 652 520,65	132 202 276,04
Pajak Daerah	18 209 276,44	21 731 062,46
Retribusi Daerah	6 108 016,99	5 604 727,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 902 898,39	4 342 620,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126 432 328,83	100 523 866,26
DANA PERIMBANGAN	680 266 516,20	624 067 025,41
Bagi Hasil Pajak	16 633 197,11	13 904 585,73
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	14 124 870,96	12 876 195,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	453 830 037,00	455 732 157,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	195 678 411,13	141 554 086,86
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 262 314,36	94 593 697,07
Pendapatan Hibah	0,00	15 546 960,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	48 091 147,33	75 069 016,48
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2 671 167,03	3 977 720,59

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2017-2018**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	21 211 061 083,11	21 763 769 643,82
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 946 514 939,90	1 755 317 338,90
Pajak Daerah	720 762 749,94	804 624 549,81
Retribusi Daerah	70 353 385,90	82 320 783,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55 087 358,31	63 284 187,04
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1 100 311 445,75	805 087 818,13
DANA PERIMBANGAN	15 232 247 423,16	15 401 585 464,78
Bagi Hasil Pajak	488 595 449,91	315 900 091,02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	136 668 714,12	232 688 790,29
Dana Alokasi Umum (DAU)	10 976 220 521,00	11 092 837 679,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 663 364 014,16	3 760 158 904,47
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4 032 298 720,05	4 606 866 840,14
Pendapatan Hibah	313 044 813,43	905 984 781,44
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 071 546 027,51	2 185 859 411,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 608 419 071,04	61 250 000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 000 000,00	11 000 000,00
Dana Desa	0,00	831 275 685,49
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 035 288 808,08	738 739 086,24

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 122 380 535,13	1 109 753 247,00
Belanja Tidak Langsung	557 581 883,66	524 340 397,00
Belanja Pegawai	374 085 523,13	340 802 447,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	509 851,00
Belanja Hibah	21 326 186,14	12 017 537,00
Belanja Bantuan Sosial	100 000,00	150 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 077 477,10	1 107 020,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	159 871 619,38	168 299 570,00
Belanja Tidak Terduga	1 121 077,92	1 453 972,00
Belanja Langsung	564 798 651,47	585 412 850,00
Belanja Pegawai	0,00	59 139 110,00
Belanja Barang dan Jasa	216 129 629,67	236 063 494,00
Belanja Modal	348 669 021,80	290 210 246,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 547 099 699,35	1 196 239 972,55
Belanja Tidak Langsung	1 067 420 863,00	656 890 245,38
Belanja Pegawai	705 140 873,53	571 588 271,59
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	31 690 799,63	83 076 562,99
Belanja Bantuan Sosial	220 700,00	282 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 259 715,53	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	327 823 068,94	0,00
Belanja Tidak Terduga	1 285 705,37	1 943 410,81
Belanja Langsung	479 678 836,35	539 349 727,17
Belanja Pegawai	0,00	99 371 378,13
Belanja Barang dan Jasa	230 922 441,43	267 689 656,16
Belanja Modal	248 756 394,92	172 288 692,88

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 072 367 515,80	1 974 462 579,60
Belanja Tidak Langsung	1 198 325 948,64	1 135 556 474,22
Belanja Pegawai	843 648 266,46	766 768 793,07
Belanja Bunga	9 065 328,63	5 379 289,34
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	22 154 377,60	21 596 946,00
Belanja Bantuan Sosial	329 000,00	342 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 536 821,55	5 971 190,67
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	319 084 082,91	333 358 722,04
Belanja Tidak Terduga	508 071,50	2 139 033,10
Belanja Langsung	874 041 567,16	838 906 105,38
Belanja Pegawai	0,00	106 463 370,50
Belanja Barang dan Jasa	334 386 211,95	349 089 852,93
Belanja Modal	539 655 355,21	383 352 881,96

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 947 093 864,02	2 002 789 116,45
Belanja Tidak Langsung	1 282 427 545,40	1 247 281 947,12
Belanja Pegawai	893 744 249,06	840 753 460,21
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	40 751 315,28	44 516 674,32
Belanja Bantuan Sosial	2 144 000,00	1 508 750,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6 525 808,66	4 891 497,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	339 148 652,40	355 433 805,60
Belanja Tidak Terduga	113 520,00	177 760,00
Belanja Langsung	664 666 318,62	755 507 169,33
Belanja Pegawai	0,00	83 107 480,69
Belanja Barang dan Jasa	343 119 078,27	386 969 018,97
Belanja Modal	321 547 240,35	285 430 669,67

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 879 206 072,22	2 600 914 765,68
Belanja Tidak Langsung	1 939 287 756,15	1 532 375 227,24
Belanja Pegawai	1 119 489 083,17	1 078 642 626,04
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	38 377 388,93	41 961 680,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	393 498 448,65	7 635 341,18
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	387 922 835,40	402 635 580,02
Belanja Tidak Terduga	0,00	1 500 000,00
Belanja Langsung	939 918 316,07	1 068 539 538,44
Belanja Pegawai	0,00	107 637 743,20
Belanja Barang dan Jasa	484 969 333,54	545 719 633,59
Belanja Modal	454 948 982,53	415 182 161,65

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 800 605 956,17	1 677 655 829,99
Belanja Tidak Langsung	1 081 942 389,86	1 076 547 008,75
Belanja Pegawai	820 370 931,97	711 642 967,69
Belanja Bunga	1 158 700,56	7 186 937,87
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	28 854 900,00	55 240 821,64
Belanja Bantuan Sosial	8 341 000,00	10 559 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	207 251,72	217 636,79
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	221 769 908,00	291 599 940,51
Belanja Tidak Terduga	1 239 697,60	99 704,25
Belanja Langsung	718 663 566,31	601 108 821,23
Belanja Pegawai	0,00	84 027 263,52
Belanja Barang dan Jasa	318 542 286,34	323 661 791,00
Belanja Modal	400 121 279,97	193 419 766,71

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 596 268 484,17	1 501 095 274,00
Belanja Tidak Langsung	965 927 760,57	712 119 061,00
Belanja Pegawai	458 573 187,13	456 599 914,00
Belanja Bunga	0,00	1 334 597,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	12 366 400,00	13 069 067,00
Belanja Bantuan Sosial	2 987 500,00	3 878 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	246 346 836,72	2 100 000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	245 546 836,72	234 953 983,00
Belanja Tidak Terduga	107 000,00	183 500,00
Belanja Langsung	630 340 723,60	788 976 213,00
Belanja Pegawai	0,00	17 887 179,00
Belanja Barang dan Jasa	273 442 298,88	305 104 298,00
Belanja Modal	356 898 424,72	465 984 736,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 148 944 548,99	1 182 413 914,00
Belanja Tidak Langsung	585 217 011,48	620 848 361,00
Belanja Pegawai	375 522 516,91	389 240 374,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1 598 196,70	0,00
Belanja Hibah	23 377 185,00	15 093 107,00
Belanja Bantuan Sosial	422 000,00	3 337 600,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	184 297 112,88	212 552 365,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	624 915,00
Belanja Langsung	563 727 537,51	561 565 553,00
Belanja Pegawai	55 645 552,10	64 104 516,00
Belanja Barang dan Jasa	252 270 767,86	266 540 218,00
Belanja Modal	255 811 217,54	230 920 819,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 469 417 438,30	1 340 200 547,61
Belanja Tidak Langsung	916 545 062,65	690 627 872,36
Belanja Pegawai	524 339 666,39	450 878 630,71
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	11 330 400,00	15 367 500,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	190 461 952,09	211 333 746,90
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	188 490 962,09	0,00
Belanja Tidak Terduga	1 922 082,08	13 047 994,75
Belanja Langsung	552 872 375,65	649 572 675,25
Belanja Pegawai	0,00	74 674 097,06
Belanja Barang dan Jasa	225 326 408,63	242 986 952,63
Belanja Modal	327 545 967,01	331 911 625,55

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 183 049 916,58	1 159 675 730,79
Belanja Tidak Langsung	688 232 267,87	654 414 610,00
Belanja Pegawai	504 919 051,93	454 028 731,46
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	14 795 003,00	18 150 533,85
Belanja Bantuan Sosial	729 000,00	6 950 750,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	875 138,14	2 071 440,08
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	166 914 074,79	173 210 397,61
Belanja Tidak Terduga	0,00	2 757,00
Belanja Langsung	494 817 648,71	505 261 120,79
Belanja Pegawai	0,00	51 115 613,47
Belanja Barang dan Jasa	219 455 091,85	243 684 446,08
Belanja Modal	275 362 556,87	210 461 061,23

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	689 748 346,90	812 660 322,64
Belanja Tidak Langsung	334 128 359,05	372 386 479,93
Belanja Pegawai	181 182 511,88	195 018 380,17
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	80 000,00
Belanja Hibah	5 498 387,33	8 383 482,27
Belanja Bantuan Sosial	15 235 000,00	32 956 900,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	132 069 059,84	135 435 102,57
Belanja Tidak Terduga	143 400,00	512 614,91
Belanja Langsung	355 619 987,85	440 273 842,72
Belanja Pegawai	47 982 462,60	58 852 193,24
Belanja Barang dan Jasa	139 167 179,55	140 851 274,61
Belanja Modal	168 470 345,71	240 570 374,86

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2017-2018**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 350 721 647,45	871 114 514,51
Belanja Tidak Langsung	714 278 156,79	286 073 677,29
Belanja Pegawai	452 470 420,07	273 346 501,64
Belanja Bunga	12 366 400,00	1 285 710,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah		10 396 978,07
Belanja Bantuan Sosial	2 987 500,00	107 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	800 000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	245 546 836,72	937 487,59
Belanja Tidak Terduga	107 000,00	0,00
Belanja Langsung	636 443 490,66	585 040 837,22
Belanja Pegawai	6 102 767,06	24 620 458,96
Belanja Barang dan Jasa	273 442 298,88	179 305 803,64
Belanja Modal	356 898 424,72	381 114 574,62

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	811 738 309,03	797 058 152,36
Belanja Tidak Langsung	323 026 153,20	353 159 255,35
Belanja Pegawai	170 107 362,23	189 415 710,88
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 581 840,00	9 989 355,00
Belanja Bantuan Sosial	1 617 175,00	7 610 893,50
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	542 960,50	1 063 495,20
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	136 815 049,73	144 194 800,77
Belanja Tidak Terduga	361 765,75	885 000,00
Belanja Langsung	488 712 155,83	443 898 897,01
Belanja Pegawai	40 890 871,47	61 326 754,93
Belanja Barang dan Jasa	133 579 037,09	152 870 696,22
Belanja Modal	314 242 247,26	229 701 445,86

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 207 777 629,00	2 190 205 773,41
Belanja Tidak Langsung	1 003 335 519,00	916 343 556,35
Belanja Pegawai	942 773 373,00	846 288 947,46
Belanja Bunga	3 782 147,00	15 537 458,76
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	52 529 492,00	49 493 407,49
Belanja Bantuan Sosial	2 576 000,00	2 372 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 171 220,00	1 171 220,00
Belanja Tidak Terduga	503 287,00	1 480 022,63
Belanja Langsung	1 204 442 110,00	1 273 862 217,06
Belanja Pegawai	130 649 351,00	155 907 216,49
Belanja Barang dan Jasa	570 506 842,74	692 755 797,24
Belanja Modal	503 285 916,26	425 199 203,34

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	839 004 712,63	870 142 022,92
Belanja Tidak Langsung	308 320 469,35	315 265 497,56
Belanja Pegawai	300 117 614,09	306 492 173,90
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 163 093,31	6 679 917,11
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	738 480,85	1 893 842,55
Belanja Tidak Terduga	301 281,10	199 564,00
Belanja Langsung	530 684 243,29	554 876 525,37
Belanja Pegawai	37 694 213,01	41 883 683,48
Belanja Barang dan Jasa	268 098 397,29	288 531 544,66
Belanja Modal	224 891 632,99	224 461 297,23

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2017-2018**

(000 Rp)

Jenis Belanja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	22 665 424 675,74	21 321 517 225,30
Belanja Tidak Langsung	12 965 997 146,67	11 094 229 670,55
Belanja Pegawai	8 666 484 630,94	7 871 507 929,80
Belanja Bunga	26 372 576,19	30 723 992,97
Belanja Subsidi	1 598 196,70	589 851,00
Belanja Hibah	323 796 768,21	405 033 569,73
Belanja Bantuan Sosial	37 688 875,00	70 055 893,50
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	845 132 410,67	236 391 367,83
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 057 209 800,66	2 455 676 817,26
Belanja Tidak Terduga	7 713 888,32	24 250 248,45
Belanja Langsung	9 699 427 529,07	10 227 287 554,75
Belanja Pegawai	318 965 217,24	1 090 118 058,68
Belanja Barang dan Jasa	4 283 357 303,96	4 621 824 477,74
Belanja Modal	5 097 105 007,86	4 480 209 556,55

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	80 835 274,35	26 076 854,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	83 235 274,35	27 576 854,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	83 235 274,35	27 576 854,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 400 000,00	1 500 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 400 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	27 550 409,11	40 512 956,90

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	(2 582 712,71)	16 149 803,42
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5 293 950,20	16 149 803,42
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	5 293 950,20	16 149 803,42
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 876 662,90	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	7 876 662,90	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(90 641 255)	25 009 993,20

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2017-2018**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	107 460 386,28	86 810 529,48
Penerimaan Pembiayaan Daerah	140 023 885,14	110 971 651,88
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	140 023 885,14	110 742 341,88
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	229 310,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	32 563 498,86	24 161 122,40
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7 970 664,06	0,00
Pembayaran Pokok Utang	24 592 834,80	24 161 122,40
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	110 587 010,53	189 705 023,02

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	30 913 866,17	101 202 014,14
Penerimaan Pembiayaan Daerah	30 913 866,17	101 202 014,14
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30 913 866,17	101 202 014,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	100 966 761,09	149 848 998,31

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2017-2018**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	197 624 086,33	54 214 484,28
Penerimaan Pembiayaan Daerah	197 624 086,33	55 714 484,28
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	197 624 086,33	55 714 484,28
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(332 208 351,12)	76 211 741,46

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	130 392 600,52	(34 167 267,81)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	130 392 600,52	28 841 791,05
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	130 392 600,52	33 855 115,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	(5 013 324,03)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	63 009 058,86
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	63 009 058,86
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berke- naan	33 751 452,58	14 947 981,34

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	35 251 179,82	123 348 552,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	36 251 179,82	124 348 552,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36 251 179,82	25 185 042,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	99 163 510,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(220 361 794,54)	7 964 847,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 708 862,76	35 082 253,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23 708 862,76	35 082 253,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23 708 862,76	35 082 253,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35 082 252,56	81 552 257,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	12 137 286,34	57 942 575,80
Penerimaan Pembiayaan Daerah	13 637 286,34	59 592 575,80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13 637 286,34	59 613 055,80
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	(20 480,00)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 500 000,00	1 650 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	1 650 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(128 877 906,20)	3 665 953,27

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	32 681 006,63	43 124 764,60
Penerimaan Pembiayaan Daerah	34 681 006,63	44 124 764,60
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34 681 006,63	44 124 764,60
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 000 000,00	1 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	44 124 764,60	33 994 635,67

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 080 265,89	81 971 285,51
Penerimaan Pembiayaan Daerah	39 792 551,10	81 971 285,51
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	26 550 347,10	81 971 285,51
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	13 242 204,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16 712 285,22	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	15 212 285,22	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	81 971 285,51	235 932 204,64

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2017-2018**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	3 042 580,15	42 282 561,96
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5 042 580,15	42 282 561,96
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2 019 292,95	22 728 135,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	698 814,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	522 300,00	18 855 612,75
Lainnya	2 500 987,20	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 000 000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 000 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	23 215 611,16	21 522 466,56

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	79 796 752,55	81 130 752,61
Penerimaan Pembiayaan Daerah	84 296 752,55	81 130 752,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84 296 752,55	81 130 752,61
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 500 000,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4 500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	738 441 026,00	59 406 488,39

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2017-2018

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	172 826 175,00	36 909 111,72
Penerimaan Pembiayaan Daerah	12 065 074,00	85 741 471,09
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	10 408 821,79
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160 761 101,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	75 332 649,30
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	36 059 763,00	48 832 359,38
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13 500 000,00	34 076 500,00
Pembayaran Pokok Utang	22 559 763,00	14 755 859,38
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	10 408 823,06	8 800 003,56

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2017-2018

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	53 656 413,16	104 868 459,93
Penerimaan Pembiayaan Daerah	53 602 673,45	106 368 459,93
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	106 333 051,65
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	53 739,71	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	35 408,29
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 500 000,00	1 500 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeaan	106 333 051,75	85 589 435,53

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2017-2018**

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	877 596 512,78	816 681 983,32
Penerimaan Pembiayaan Daerah	985 708 722,76	1 011 166 883,33
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	808 628 390,85	811 817 774,97
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	160 761 101,00	698 814,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	53 739,71	75 332 649,30
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	229 310,00
Penerimaan Piutang Daerah	13 764 504,00	18 891 021,04
Lainnya	2 500 987,20	104 197 314,03
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	108 112 209,98	194 484 900,01
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	37 870 664,06	42 226 500,00
Pembayaran Pokok Utang	70 241 545,92	101 926 040,64
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	2 084 521 754,75	1 034 664 985,85

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

The background is a light blue gradient with a large yellow diagonal shape on the left. It is decorated with various data visualization icons: 3D bar charts in the top left, magnifying glasses over bar charts in the top right and middle left, a line graph with a red arrow in the bottom left, a pie chart and bar chart in the bottom center, and another line graph with a red arrow in the bottom right. A watermark URL 'http://lampung.pns.go.id' is visible across the center.

LAMPIRAN

GAMBAR



APBD

PROVINSI LAMPUNG

2018

REALISASI PENERIMAAN

**APBD 2018 TURUN 6,32 %
DARI YANG DIANGGARKAN**



**REALISASI
PENGELUARAN
APBD 2018**

**TURUN 7,47 %
DARI YANG
DIANGGARKAN**



BELANJA LANGSUNG

**TURUN 2,17 %
DARI ANGGARAN
2018**



**BELANJA TIDAK LANGSUNG
TURUN 10,37 % DARI
ANGGARAN
2018**

**SILPA
REALISASI APBD
2018 SURPLUS**

**Rp. 93,78
MILYAR**

REALISASI PAD



NAIK

**4,13 %
DIBANDINGKAN
TAHUN 2017**

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1).

BPS Provinsi Lampung. 2019. PDRB Provinsi Lampung Menurut Pengeluaran 2014-2018.

<https://lampung.bps.go.id>



D A T A
MENCERDASKAN BANGSA

<http://lampung.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: bps1800@bps.go.id, Website: <http://lampung.bps.go.id>

